

2023



LAPORAN KINERJA

DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Tujuan penyusunan antara lain untuk mendorong terciptanya Laporan Kinerja sebagai salah satu prasyarat untuk menciptakan tata kelola yang baik dan terpercaya. Disisi lain laporan ini dimaksudkan pula sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelola sumberdaya yang didasarkan pada perencanaan strategik yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Sungailiat, Februari 2024

Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670504 199403 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS	15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B. Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah ...	10
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja	12
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan.....	13
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama.....	14
Tabel 3.1 Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran	16
Tabel 3.2 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	17
Tabel 3.3 Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2023.	18
Tabel 3.4 Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan Tahun 2023	21
Tabel 3.5 Persentase Tenaga Kerja Asing Tahun 2023	22
Tabel 3.6 Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat-syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagkerjaan Tahun 2023	23
Tabel 3.7 Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	28
Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran.....	29
Tabel 3.9 Ikhtisar Kinerja Program dan Kegiatan.....	31
Tabel 3.10 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	33
Tabel 3.11 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023	34
Tabel 3.12 Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	36
Tabel 3.13 Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran	38
Tabel 3.14 Ikhtisar Kinerja Program dan Kegiatan.....	40
Tabel 3.15 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	41
Tabel 3.16 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023	42
Tabel 3.17 Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	44
Tabel 3.18 Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran	45
Tabel 3.19 Ikhtisar Kinerja Program dan Kegiatan.....	47
Tabel 3.20 Data Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	49
Tabel 3.21 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	58
Tabel 3.22 Anggaran dan Realisasi pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I-1	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Reformasi birokrasi telah menjadi isu terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Dalam era reformasi birokrasi ini, perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting yang dijalankan oleh Pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur serta efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan kepada setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyelenggarakan SAKIP yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Tujuan dari pelaporan kinerja adalah : 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ada dan seharusnya dicapai, 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- 1) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
- 2) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

- 3) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D).

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 100);

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :

FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian serta perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan UPT; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan;

KEWENANGAN

Kewenangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka meliputi :

a. Tenaga Kerja :

1. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
 - a) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
 - b) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
 - c) Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
 - d) Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
 - e) Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten.
2. Penempatan Tenaga Kerja :
 - a) Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten;
 - b) Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - c) Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten;
 - d) Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten;
 - e) Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
3. Hubungan Industrial :
 - a) Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - b) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten.

B. Perindustrian :

1. Perencanaan pembangunan Industri

Penetapan rencana pembangunan industri.

1. Perizinan

a) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) kecil Menengah;

b) Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri kecil dan menengah: dan

c) Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah.

2. Sistem Informasi Industri Nasional :

a. Penyampaian Laporan informasi industri untuk :

a) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan izin Perluasannya;

b) Izin Usaha Industri (IUI) Menengah dan Izin Perluasannya; dan

c) Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah.

C. Perdagangan :

1. Perizinan dan pendaftaran perusahaan :

a) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;

b) Penerbitan tanda daftar gudang dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);

c) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk :

1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;

2) Penerima Waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri;

3) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dari waralaba luar negeri;

d) Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;

e) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan perlabelan bahan berbahaya di tingkat daerah;

f) Rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau; dan

g) Penerbitan surat keterangan asal.

2. Sarana Distribusi Perdagangan :
 - a) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - b) Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting :
 - a) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah;
 - b) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar;
 - c) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah;
 - d) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4. Pengembangan Ekspor :
 - a) Penyelenggaraan promosi melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah;
 - b) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi.
5. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen :

Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

D. Pembinaan UPT

E. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahi :

Kelompok Jabatan Fungsional.

- 4) Bidang Hubungan Industrial membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional.

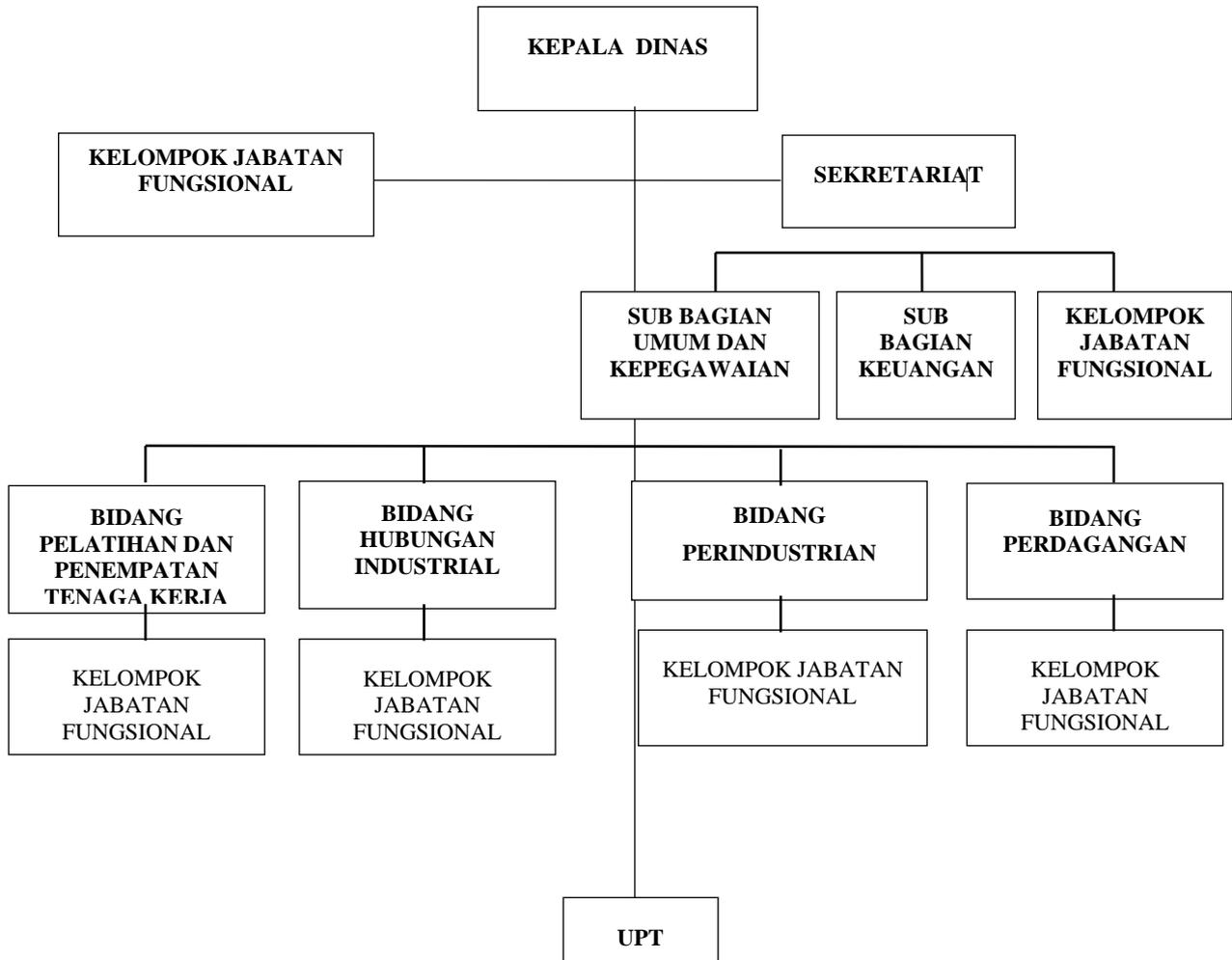
- 5) Bidang Perindustrian membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional.

- 6) Bidang Perdagangan membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional.

- 7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka



Aspek Strategis Organisasi Serta Permasalahan Utama (*strategic issued*)

Tahun 2023 merupakan tahun Kelima atau tahun terakhir pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada Visi Misi Kabupaten Bangka yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Rumusan Visi Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah "**Bangka Setara**". Seluruh stakeholder di Kabupaten Bangka secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kabupaten Bangka lebih sejahtera dan memiliki Martabat yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan pembangunannya hingga tahun 2023 akan lebih fokus pada misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah;
4. Mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional;
5. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Secara substansi berdasarkan uraian kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka maka terdapat 3 (tiga) urusan wajib pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yaitu: urusan Tenaga Kerja, Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan.

Dalam pelaksanaan ketiga urusan dimaksud beberapa isu strategis yang dihadapi adalah :

1. Mengadakan Pelatihan-pelatihan keterampilan dan Kewirausahaan kepada tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang produktif, terampil dan kompeten sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran;
2. Menyebarluaskan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
3. Mempersiapkan Angkatan Pra Kerja yang lebih baik untuk transisi dunia kerja;
4. Mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja;
5. Pengembangan Database Angkatan Pra Kerja;

6. Mengadakan Perselisihan antar pekerja/buruh dengan pengusaha terkait perselisihan hak, PHK, kepentingan serikat pekerja/buruh;
7. Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Adanya penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK);
9. Memberikan pelatihan kepada IKM;
10. Memfasilitasi bantuan peralatan teknologi kepada IKM;
11. Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk IKM;
12. Memfasilitasi IKM untuk mendapatkan sertifikat SNI, GMP, HACCP Halal, Desain kemasan dan merek serta uji nutrisi;
13. Memfasilitasi akses pembiayaan kepada IKM;
14. Menjaga stabilitas harga barang dan kebutuhan pokok dan barang penting;
15. Peningkatan standarisasi perlindungan konsumen;
16. Peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan;
17. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana industri bagi perdagangan;
18. Peningkatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perjanjian kinerja merupakan hal yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian yang dilakukan instansi dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Perjanjian kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengetahui apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besaran capaian target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yang menjadi indikator pada RPJMD. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bangka Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	-	-	23,84%	31,77%	32,15
2.	Meningkatkan pertumbuhan sektor IKM	Persentase Laju Pertumbuhan IKM	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	22,56%	22,58%	22,58%	22,62%	22,64%
3.	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,78%	14,19%	14,32%	14,51%	14,68%

4.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pemerintahan yang akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
				Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB (74,00)	BB (74,25)	BB (74,50)

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan hal yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian yang dilakukan instansi dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Perjanjian kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengetahui apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besaran capaian target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yang menjadi indikator pada RPJMD. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2023 disusun untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 dengan melaksanakan 9 Program. Didalam perjanjian kinerja juga tercantum rencana anggaran untuk setiap programnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.2.
PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks	32,15
2.	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	22,64
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,68
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	BB (74,50)

No	Program	Anggaran	KET
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.099.486.620,00	APBD
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	117.746.800,00	APBD
3.	Penempatan Tenaga Kerja	157.265.000,00	APBD
4.	Hubungan Industrial	177.356.000,00	APBD
5.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.614.519.880,00	APBD
6.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	157.000.000,00	APBD
7.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	146.000.000,00	APBD
8.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.029.861.365,00	APBD
9.	Pengendalian Izin Usaha Industri	10.472.500,00	APBD
10.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	16.000.000,00	APBD
	TOTAL	13.525.708.165,00	

Tabel 2.3.
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks	32,15
2.	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	22,64
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,68
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	BB (74,50)

No	Program	Anggaran	KET
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.421.427.658,00	APBD
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	117.746.800,00	APBD
3.	Penempatan Tenaga Kerja	125.896.960,00	APBD
4.	Hubungan Industrial	144.831.590,00	APBD
5.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.504.719.430,00	APBD
6.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	407.000.000,00	APBD
7.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	141.000.000,00	APBD
8.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.463.317.721,00	APBD
9.	Pengendalian Izin Usaha Industri	10.472.500,00	APBD
10.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	16.000.000,00	APBD
	TOTAL	13.352.412.659,00	

Tabel 2.4.

Indikator Kinerja Utama

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketengakerjaan Daerah	Indeks		$\text{IPKD} = \% \text{ Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} + \% \text{ Pencari Kerja yang ditempatkan} + \% \text{ TKA yang terdata} + \% \text{ Perusahaan yang menerapkan syarat-syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan dibagi 4}$	Bidang Tenaga kerja dan Bidang Hubungan Industrial
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%		$\text{Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dibagi PDRB} \times 100\%$	BPS
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%		$\text{Kontribusi Sektor Perdagangan dibagi PDRB} \times 100\%$	BPS

BAB III AKUNTABILITAS

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2019-2023. Keberhasilan/kegagalan diukur berdasarkan pencapaian indikator sasaran terhadap masing-masing sasaran strategik, tujuan dari setiap misi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/target kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi.

Pengukuran prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \% \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \% \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

NO.	SKALA	KINERJA SASARAN
1	> 85	Sangat Baik / Sangat Berhasil
2	$70 < x < 85$	Baik / Berhasil
3	$55 < x < 70$	Sedang / Cukup Berhasil
4	< 55	Sangat Kurang / Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian 4 (empat) sasaran yang mencakup 4 (Empat) indikator kinerja setingkat *outcome* diperoleh hasil bahwa 3 sasaran masuk dalam kategori **sangat baik/sangat berhasil** dengan nilai capaian diatas 100 % dengan 2 indikator sasaran, 1 Indikator sasaran yang capaiannya dibawah 100% dan 1 Indikator Sasaran yang belum ada penilaian.

Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 merupakan gambaran Kinerja Tahun Kelima untuk Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2023. Rumusan Tujuan, Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dan review RPJMD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil review terhadap Renstra Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Lebih lanjut pencapaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah

a. *Analisa perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Keberhasilan Sasaran Strategi diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase kepatuhan peningkatan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja.

Tabel 3.2
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2023

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks	32,15	41,38	128,71	Sangat Baik/Berhasil

Berdasarkan tabel diatas Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 32,15 persen dan dapat direalisasikan sebesar 41,38 persen dengan capaian kinerja 128,71 persen dan termasuk kategori sangat baik/berhasil. Hasil dari realisasi tersebut dengan cara menambahkan Hasil Indikator Program yaitu Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja + Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan + Persentase TKA yang terdata + Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat-syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagkerjaan dibagi 4, dengan rincian Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (6,79%), Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (5,20%), Persentase TKA yang terdata (100%), Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat-syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagkerjaan (53,52%). Hasil yang diperoleh menunjukkan tagert tidak tercapai ditahun 2023, dengan data dukung sebagai berikut :

Tabel 3.3
Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2023

Tabel 12.2 **Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bangka (miliar rupiah), 2019–2023**
Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Industry in Bangka Regency (billion rupiahs), 2019–2023

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1.975,90	2.102,11	2.148,41	2.174,99	2.262,24
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1.398,70	1.368,59	1.500,69	1.528,51	1.510,59
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	2.330,65	2.332,82	2.615,17	2.826,06	2.912,93
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	19,41	20,52	23,61	22,65	22,81
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	1,94	2,04	2,14	2,23	2,37
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	885,87	851,12	891,92	893,74	969,44
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.213,96	1.124,05	1.201,95	1.331,40	1.365,12
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	223,16	198,24	219,15	239,07	259,09
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	242,12	227,70	254,34	284,15	315,18
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	268,29	303,34	330,01	361,34	407,54

Lanjutan Tabel/Continued Table 12.2

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	264,45	238,90	252,12	268,84	315,00
L	Real Estat/Real Estate Activities	346,54	351,56	376,30	393,94	411,36
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	21,74	18,34	19,43	21,49	23,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	500,01	489,11	512,27	505,17	534,19
P	Jasa Pendidikan/Education	192,12	191,15	197,74	205,62	228,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	101,70	102,81	119,02	121,59	132,64
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	72,23	66,40	69,59	75,28	83,57
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		10.058,79	9.988,80	10.733,86	11.256,07	11.756,20

Catatan/Note: *Angka Sementara/Preliminary Figures

**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

Tabel 3.2.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Bangka, 2023
Population 15 Years of Age and Over by Educational Attainment and Type of Activity During the Previous Week in Bangka Regency, 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment¹</i>	Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja <i>Percentage of Working to Economically Active</i>
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran ² <i>Unemployment²</i>	Jumlah Angkatan Kerja <i>Total of Economically Active</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	59.761	3.815	63.576	94,00
1	21.982	1.157	23.139	95,00
2	56.721	2.950	59.671	95,06
3	25.925	786	26.711	97,06
Jumlah/Total	164.389	8.708	173.097	94,97

Rumus : (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) / Angkatan kerja) x 100%
: 11.756,20 / 173.097 X 100 = 6,79%

Tabel 3.4
Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan Tahun 2023

**PENCARI KERJA TERDAFTAR, LOWONGAN KERJA TERDAFTAR DAN PENEMPATAN /PEMENUHAN TENAGA KERJA
MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2023
KABUPATEN BANGKA**

KECAMATAN	PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR			LOWONGAN KERJA TERDAFTAR			PENEMPATAN/PEMENUHAN TENAGA KERJA		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Mendo Barat	33	32	65	1	0	1	1	0	1
Merawang	27	35	62	1	0	1	1	0	1
Sungailiat	66	68	134	0	0	0	0	0	0
Pemali	25	26	51	0	0	0	0	0	0
Riau Silip	7	7	14	7	7	14	7	7	14
Puding Besar	10	8	18	0	0	0	0	0	0
Belinyu	21	23	44	4	1	5	4	1	5
Bakam	8	8	16	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	197	207	404	13	8	21	13	8	21

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan</i>	<i>(Jumlah Penempatan /Jumlah Pencari kerja) x 100 %</i>	$21/404*100\% =$	5,20%
--	--	---	------------------	--------------

Sungailiat, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670504 199403 1 013

Tabel 3.5
Persentase Tenaga Kerja Asing Tahun 2023

DATA TKA 2023
DI PERUSAHAAN KABUPATEN BANGKA

NO	NAMA PERUSAHAAN	JH	NAMA TKA	JABATAN	NEGARA ASAL	MASA BERLAKU	LOKASI KERJA	KBT
1	PT. GUNUNG MARAS LESTARI	1	TAN GAN HOH	MILL ADVISOR	MALAYSIA	29/04/2024	LINTAS	
		2	NG NEW SENG	FINANCE CONTROLLER	MALAYSIA	09/04/2024	LINTAS	
		3	HENRY CHEAH AH JONG	PLANTATION MANAGER	MALAYSIA	09/11/2024	LINTAS	
		4	RAJA RAMI AL GANAFUKHY	RESEARCH & DEV. ADVISOR	MALAYSIA	30/10/2024	LINTAS	
2	PT. GUNUNG PELAJAN LESTARI	1	PARTHASARATHI PRABHUSAMY	QUALITY CONTROL ADVISOR	INDIA	30/11/2024	BANGKA	
		2	GUMAZZARWAN SUTHIRADAM	OPERATION DIRECTOR	MALAYSIA	27/06/2024	BANGKA	
3	PT. TATA HAMPARAN EKA PERSADA	1	KIM JON SOOK	PRESIDENT DIRECTOR	KORSEL	10/08/2024	LINTAS	
		2	KIM YOUNGMAN	PLANTATION MANAGER	KORSEL	22/05/2024	LINTAS	
		3	REYNOLD RICHARD	PRODUCTION MANAGER	MALAYSIA	05/08/2024	LINTAS	
		4	BAE SUNG TAE	RESEARCH AND DEVELOPMENT ADVISOR	KORSEL	30/09/2024	LINTAS	
4	PT. KUDA MAS PERSADA	1	JENS CHRISTIAN LOUWE	TECHNICAL MANAGER	JERMAN	00/00/2024	BANGKA	
5	KTD BAKULI MANESSI	1	WANU JIM MING	QUALITY CONTROL ENGINEER	RRC	31/03/2024	BANGKA	
6	PT. KUANG JAYA MANESSI	1	YANG MINGJIAN	ELECTRICAL ENGINEER	RRC	22/02/2022	BANGKA	
7	PT. PUTRA PRIMA MINERAL BANGKA	1	HILANG DINDOJANI	MARSHALLING DIRECTOR	RRC	26/11/2023	LINTAS	
8	PT. RUMEBEKI BANGKA TBK	1	ZHONG JINGLIAN	ELECTRICAL ENGINEER	RRC	10/01/2024	LINTAS	
		2	ZI JINSHENG	TECHNICAL ENGINEER	RRC	03/05/2024	LINTAS	
		3	LI JIAZHONG	MECHANICAL ENGINEER	RRC	03/05/2024	LINTAS	
		4	XIEU ZHENGLIA	MECHANICAL ENGINEER	RRC	08/03/2024	LINTAS	
		5	ZHANG CHUANLAI	MECHANICAL ENGINEER	RRC	22/01/2024	LINTAS	
		6	ZHU DONGSHENG	TECHNICAL ENGINEER	RRC	22/01/2024	LINTAS	
		7	ZENG XIMING	TECHNICAL ENGINEER	RRC	22/01/2024	LINTAS	
		8	HUANG BANGHUI	MECHANICAL ENGINEER	RRC	22/01/2024	LINTAS	
		9	WANG GUOQING	MECHANICAL ENGINEER	RRC	03/05/2024	LINTAS	
		10	GU KANG	MECHANICAL ENGINEER	RRC	19/01/2024	LINTAS	
		11	KONG XIANYOU	MECHANICAL ENGINEER	RRC	18/01/2024	LINTAS	
		12	LI ZHONGQI	ELECTRICAL ENGINEER	RRC	08/03/2024	LINTAS	
9	PT. BAHARI MARLIN SEJAHTERA	1	NET KETSABIRAN	QUALITY CONTROL ADVISOR	THAILAND	11/01/2024	BANGKA	
		2	ARTHUP WIKRAMANUNOM	Mechanical Engineer	THAILAND	30/11/2024	BANGKA	
10	PT. BANGKA TBK INDUSTRI	1	LI CHANGMING	ELECTRICAL ENGINEER	RRC	21/11/2024	BANGKA	
		2	LI FUWEN	ELECTRICAL ENGINEER	RRC	04/10/2024	LINTAS	
		3	LIU LICHONG	PRODUCTION ENGINEER	RRC	21/11/2024	BANGKA	
		4	XUO RONG	TECHNICAL ADVISOR	RRC	21/11/2024	BANGKA	
		5	ZHU HUIJUN	TECHNICAL ADVISOR	RRC		BANGKA	
11	PT. PUTERA SARANA SHAKTI	1	XIE QIONGHUA	MECHANICAL ENGINEER	RRC	04/10/2024	LINTAS	
		1	CHEN SHIBANG	ELECTRICAL ADVISOR	RRC	15/05/2024	LINTAS	
		2	GOU YINGDUO	QUALITY CONTROL ADVISOR	RRC	12/05/2024	LINTAS	
		3	GOU ZUHE	QUALITY CONTROL ADVISOR	RRC	15/05/2024	LINTAS	
		4	TANG DEYAN	MACHINE MAINTENANCE ADVISOR	RRC	12/05/2024	LINTAS	
5	LIU SHIRAN	MACHINE MAINTENANCE ADVISOR	RRC	12/05/2024	LINTAS			
12	PT MITRA STAMA PRIMA	1	GONG XIAJUN	MECHANICAL ENGINEER	RRC	16/07/2024	LINTAS	
		2	ZHU QIALONG	MECHANICAL ENGINEER	RRC	16/07/2024	LINTAS	
		3	WU KLINGJIANG	MECHANICAL ENGINEER	RRC	16/07/2024	LINTAS	
		4	LI TUDHONG	MECHANICAL ENGINEER	RRC	16/07/2024	LINTAS	
JUMLAH		44						

Ket : Kol. Bangka : 11
Lintas : 33

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TKA YANG TERDATA	JUMLAH PERPAJANGAN IMTA DI KABUPATEN BANGKA SEBAGI JUMLAH TKA DI KABUPATEN BANGKA X 100%	$(11/11) \times 100\% = 100\%$
---------------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------

Sungailiat, 29 Desember 2023

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670504 193403 1 013

Tabel 3.6
Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat-syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagkerjaan Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Jend. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat - Bangka,
Kode Pos 33215 Telp (0717) - 92522 Fax (0717) - 92522

**DATA PERUSAHAAN YANG BELUM DAN SUDAH MEMILIKI PERATURAN PERUSAHAAN
DI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023**

NO	SEKTOR GASERAS LAYANAN UGAS INDONESIA (SLU)	KEMANTAN	AWAL TERANGI USAHA					Sikap Perusahaan	Peraturan perusahaan	Cat
			WNI		WNA		SBL			
			L	P	L	P				
I. Persewaan, Pemeliharaan, Kabinamen, Perbaikan, dan Perbaikan										
1	P.T. PAVIWA MIRA TETA	MENANGKAB	19	2	-	-	81	SIDANG	1	PP Tidak ada
2	P.T. GUNUNG MANGU LESTARI (GAL) TETA	BANGSU	79	39	4	-	900	SEKAR	1	PP
3	P.T. GUNUNG PELAWAN (GPA)	SELAYU	1.267	720	2	-	1.771	SEKAR	1	PP
4	P.T. PUTRA BANGKA MANDIRI	MENGO-SARIT	221	11	-	-	234	SEKAR	1	PP Tidak ada
5	P.T. TATA HARAPAN TEK PERUSAHA	PEMALU	205	28	1	-	135	SEKAR	1	PP Tidak ada
6	P.T. PAVIWA MIRA TETA	SUNGAILIAT	45	0	-	-	14	SEKAR	1	PP Tidak ada
7	P.T. GUNUNG MANGU LESTARI (GAL) PETA	BANGSU	234	18	2	-	233	SEKAR	1	PP
8	P.T. PALMINDO BINTA LESTARI	BANGSU	118	10	-	-	128	SEKAR	1	PP Tidak ada
9	P.T. CHANDER PERPADANG JAYA LESTARI	MENGO-SARIT	11	4	-	-	15	KOTA	-	-
Jumlah									8	
II. Persewaan dan Pengolahan										
1	P.T. ADITA ELANA BETA	SUNGAILIAT	20	4	-	-	45	SEKAR	-	-
2	P.T. ANEKA BANGKA TEKNIK LESTARI	BANGSU	36	5	-	-	41	SEKAR	1	PP Tidak ada
3	P.T. BUNDA LESTARI	BANGSU	26	4	-	-	30	KOTA	-	-
4	P.T. ANEKA AGRI WISATA MANDIRI	BANGSU	22	-	-	-	18	KOTA	-	-
5	P.T. PUTRA TERANGI SANGKALING	PEMALU	16	2	-	-	17	KOTA	-	-
6	P.T. BANGKA LINTAS BANGKA	BANGSU	1.052	10	-	-	1.060	SEKAR	1	PP
7	P.T. PUSKAS TENDRA	SUNGAILIAT	11	2	-	-	14	SEKAR	-	-
Jumlah									8	
III. Industri Pengolahan										
1	P.T. BANGKA ASRI AGRI	SUNGAILIAT	-	-	-	-	-	SEKAR	1	PP Tidak ada
2	P.T. ANEKA UTAMA	MENGO-SARIT	220	10	-	-	230	SEKAR	1	PP
3	P.T. BANGKA	PEMALU	11	2	-	-	14	KOTA	-	-
4	P.T. BANGKA LAYANAN	SUNGAILIAT	0	0	-	-	10	KOTA	-	-
5	P.T. BANGKA LAYANAN	SUNGAILIAT	3	2	-	-	14	KOTA	-	-
6	P.T. BANGKA	SUNGAILIAT	10	1	-	-	17	KOTA	-	-
7	P.T. BANGKA BETA	SUNGAILIAT	4	4	-	-	12	KOTA	-	-
8	P.T. BANGKA BANGKA ALAM	MENANGKAB	11	0	-	-	4	KOTA	-	-
9	P.T. BANGKA BANGKA ALAM	MENANGKAB	13	5	-	-	1	KOTA	-	-

NO	NAMA KUMPERAN (PANGKAS) USAHA BUDIDAYA (KUB)	ALAMAT KECAMATAN	LUAH TANGGA (HA)				JML	Kategori Perikanan	Pembelian perikanan	Jenis
			WU		WU					
			L	P	L	P				
10.01	NETA (LINA HIRAN)	SUNGAILIT	240	20	2	-	262	SIKAP	1	PP (Sukarelat)
11.01	TRIS (DITA MANIRI)	BALUSIP	18	2	-	-	20	KEL	-	
12.01	ROSE (RIZKY)	SUNGAILIT	30	18	-	-	48	KIKS	1	PP (Pondok)
13.01	REBEC (BANGSA TR)	SUNGAILIT	278	34	2	-	314	KICP	1	PP (Sukarelat)
14.01	HAJA (RIZKI)	MERANGKAI	30	18	-	-	48	WISMANA	-	
15.01	FRANCA (WINDA)	SUNGAILIT	5	8	-	-	14	KEL	-	
16.01	WU (MAMUKI BAHEN)	SUNGAILIT	188	4	6	1	207	KISAP	-	
17.01	SUNILAH (ANITA MENDI)	BAKAM	32	-	-	-	32	KICP	1	PP
18.01	BANGSA TR (RIZKI)	SUNGAILIT	49	14	-	-	63	SIKAP	1	PP (Sukarelat)
19.01	ALYAN (ALYAN)	SUNGAILIT	23	8	-	-	31	KEL	-	
20.01	TIARA (SITI MARIAN) (SRI MARIAN)	SUNGAILIT	438	21	-	-	459	KISAP	1	PP
21.01	YAMA (SUNILAH)	SUNGAILIT	14	3	-	-	17	SIKAP	-	
22.01	KOR (MIRI)	SUNGAILIT	30	-	-	-	30	KIKS	-	
23.01	PUJANG (SRI MARIAN)	SUNGAILIT	38	4	13	-	55	WISMANA	1	PP (Sukarelat)
24.01	PERISA (SITI) (SITI) (SRI) (SRI) (SRI)	SUNGAILIT	9	3	-	-	14	KEL	-	
25.01	KARIN (SRI) (SRI)	SUNGAILIT	14	3	-	-	17	KIKS	-	
26.01	RI (SRI) (SRI)	SUNGAILIT	45	3	-	-	48	SIKAP	-	
27.01	TONG (SRI) (SRI) (SRI)	SUNGAILIT	20	3	-	-	23	KEL	-	
28.01	NETA (SITI) (SRI) (SRI)	SUNGAILIT	21	3	-	-	24	SIKAP	-	
29.01	Sinar Baku Baku (Sinar)	Pulau	85	13	8	8	112	SIKAP	1	PP (Sukarelat)
30.01	Mitra Agro Sembada	Pulau	328	13	9	8	358	KICP	1	PP (Sukarelat)
Jumlah									18	
4. Liris, dan, dan										
1.01	TRIS (DITA MANIRI)	SUNGAILIT	18	2	-	-	20	SIKAP	-	
2.01	UNABO (SITI) (SRI)	MERANGKAI	23	3	-	-	26	KIKS	1	PP (Sukarelat)
3.01	ME (SRI)	MERANGKAI	13	-	-	-	13	KEL	1	PP
4.01	RI (SRI)	MERANGKAI	11	4	-	-	15	KEL	1	PP
5.01	RI (SRI) (SRI) (SRI) (SRI)	MERANGKAI	52	-	-	-	52	SIKAP	1	PP
6.01	RI (SRI) (SRI) (SRI) (SRI) (SRI)	MERANGKAI	178	8	-	-	186	KICP	1	PP
7.01	RI (SRI) (SRI) (SRI)	MERANGKAI	5	3	-	-	8	KEL	1	PP (Sukarelat)
8.01	BANGSA TR (SRI) (SRI)	MERANGKAI	13	2	-	-	15	KEL	1	PP (Sukarelat)
9.01	RI	MERANGKAI	24	3	-	-	27	SIKAP	-	
Jumlah									7	
5. Pangasinan										
1.01	RI (SRI) (SRI) (SRI)	SUNGAILIT	44	10	-	-	54	SIKAP	1	PP (Pondok)
2.01	RI (SRI) (SRI) (SRI)	SUNGAILIT	21	1	-	-	22	KEL	-	
3.01	RI (SRI) (SRI) (SRI) (SRI)	SUNGAILIT	23	18	-	-	41	SIKAP	-	
4.01	RI (SRI) (SRI) (SRI)	SUNGAILIT	18	-	-	-	18	KEL	-	
5.01	RI (SRI) (SRI) (SRI)	MERANGKAI	13	3	-	-	16	SIKAP	-	
Jumlah									1	

No.	NOMOR KLASIFIKASI LAMPAHAN USAHA INDONESIA (KLU)	NOMOR KECAMATAN	JMLAH TANAH RUMAH				Kategori Pemukiman	Perkiraan jumlah	Kd	
			MRT		MRA					JML
			L	P	L	P				
B. Perdagangan Besar, Jember, dan Daerah Mula-mula Kota										
	1. SANGAT DEPT. 0208	SUNGAILIT	2	11	-	-	13	2 (100)	-	
	2. SANGAT BRT	SUNGAILIT	6	7	-	-	13	RTD	1	
	3. PT. BUKAN (KLU) PANGKALAN (KLU) PANGKALAN	SUNGAILIT	10	11	1	1	46	MENENGAH	1	
	4. SANGAT (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	SUNGAILIT	3	7	-	-	10	RTD	1	
	5. PT. TANJANG PERUM	SUNGAILIT	16	11	-	-	71	RTD	1	
	6. RTD (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	SUNGAILIT	7	3	-	-	10	RTD	-	
	7. PT. PANGKALAN MUKHUTAB	SUNGAILIT	11	28	-	-	39	RTD	1	
	8. RTD (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	SUNGAILIT	7	5	-	-	12	RTD	-	
	9. CV. SUMBER JATI	SUNGAILIT	9	5	-	-	14	RTD	1	
	10. SANGAT (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	SUNGAILIT	11	-	-	-	11	RTD	-	
	11. SANGAT (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	SUNGAILIT	17	-	-	-	17	RTD	-	
	12. PT. 12 (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	SUNGAILIT	11	8	-	-	29	RTD	1	
	13. SANGAT (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	SUNGAILIT	9	3	-	-	12	RTD	-	
	14. SANGAT (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	SUNGAILIT	8	32	2	-	42	RTD	-	
	15. PT. 12 (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	BEJAY	10	3	-	-	13	RTD	-	
	16. SANGAT (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	PANGKALAN	4	8	-	-	12	RTD	-	
	17. (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	SUNGAILIT	21	7	-	-	27	MENENGAH	1	
	18. PT. 12 (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	SUNGAILIT	24	7	-	-	31	RTD	-	
	19. PT. 12 (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	BEJAY	8	8	-	-	16	RTD	-	
	20. CV. 12 (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	SUNGAILIT	40	10	-	-	50	RTD	-	
	21. RTD (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	SUNGAILIT	11	9	-	-	20	MENENGAH	1	
	22. RTD (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	MENENGAH	11	8	-	-	19	RTD	-	
	23. PT. 12 (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	BEJAY	9	3	-	-	12	RTD	-	
	24. CV. 12 (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	SUNGAILIT	11	3	-	-	14	RTD	-	
	25. PT. 12 (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	BEJAY	8	4	-	-	12	RTD	1	
	26. SANGAT (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	BEJAY	1	3	-	-	4	RTD	-	
	27. PT. 12 (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	SUNGAILIT	11	4	-	-	15	MENENGAH	-	
	28. PT. 12 (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	SUNGAILIT	7	2	-	-	9	RTD	1	
	29. PALM (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	SUNGAILIT	9	30	-	-	39	RTD	-	
	30. CV. 12 (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	SUNGAILIT	14	-	-	-	14	RTD	-	
	31. CV. 12 (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	MENENGAH	11	9	-	-	20	RTD	1	
	32. PT. 12 (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	BEJAY	10	2	-	-	12	RTD	-	
	33. SANGAT (KLU) 12 (KLU) 12 (KLU)	BEJAY	8	2	-	-	10	RTD	1	
Jumlah							68			

No.	NAMA DAN ALAMAT LAPANGAN USAHA (NAMA DAN ALAMAT)	ALAMAT KORPORATIF	JANUARI 2023					Kategori Perumahan	Pembayaran pembayaran	Ses
			SMA		SMA		SMA			
			L	P	L	P				
C. Industri, Perdagangan, dan Jasa										
1	PT. PEGAS Jaya	MELAWANG	21	2	-	-	23	SDAG	1	PP Swastakarya
2	PT. Nusantara Formal Sejahtera	MELAWANG	74	28	-	-	102	SDAG	1	PP Swastakarya
3	PT. KESAWA KESAJAJARAN	MELAWANG	21	3	-	-	24	SDAG	-	-
4	PT. LANCATER WISATA USAHAWA	MELAWANG	7	4	-	-	11	SDG	-	-
5	PT. Asri Mahira Sejahtera	MELAWANG	20	4	-	-	24	SDG	1	PP Swastakarya
6	PT. Bersama Sukses Mandiri	MELAWANG	70	10	-	-	80	SDAG	1	PP Swastakarya
Jumlah			203	48	0	0	251		4	
D. Perdagangan, Industri, Jasa Perumahan, Jasa, dan Jasa Perumahan										
1	PT. KEMAS	SUNGAILAT	300	25	-	-	325	SDAG	-	-
2	PT. BAWA MANDIRI (Perdagangan, Jasa)	SUNGAILAT	0	0	-	-	0	SDG	1	PP
3	PT. BAWA MA (Perdagangan)	SUNGAILAT	7	1	-	-	8	SDG	1	PP
4	PT. BAWA MA (Perdagangan) Cabang Sungailat	SUNGAILAT	23	43	-	-	66	SDAG	1	PP
5	BANK SUMSI	SUNGAILAT	7	2	-	-	9	SDG	1	PP PUSAT
6	PT. BAWA (INDUSTRI) TB	SUNGAILAT	0	13	-	-	13	SDG	1	PP
7	PT. BAWA TUNJUNG BARUDA	SUNGAILAT	47	24	-	-	71	SDAG	1	PP PUSAT
8	PT. BAWA MUDA TB	SUNGAILAT	7	7	-	-	14	SDG	1	PP PUSAT
9	PT. BAWA SITI TB SUNGAILAT	SUNGAILAT	0	4	-	-	4	SDG	1	PP PUSAT
10	PT. BAWA SARANAH BUKITINGGA TB (Jasa Logistik)	SUNGAILAT	11	0	-	-	11	SDG	1	PP PUSAT
11	PT. BAWA SUNGAILAT BUKITINGGA LAYANAN	SUNGAILAT	11	0	-	-	11	SDG	1	PP PUSAT
12	PT. BAWA SUNGAILAT BUKITINGGA TB	SUNGAILAT	11	0	-	-	11	SDG	1	PP PUSAT
13	PT. BAWA SUNGAILAT TB	SUNGAILAT	8	7	-	-	15	SDG	1	PP PUSAT
14	PT. BAWA SUNGAILAT (INDUSTRI)	SUNGAILAT	7	2	-	-	9	SDG	1	PP PUSAT
15	PT. BAWA SUNGAILAT BUKITINGGA TB (Jasa Logistik)	SUNGAILAT	0	4	-	-	4	SDG	1	PP PUSAT
16	PT. SUNMI (INDUSTRI)	SUNGAILAT	30	0	-	-	30	SDG	1	PP PUSAT
17	PT. SUNMI (INDUSTRI) TB	SUNGAILAT	16	2	-	-	18	SDG	1	PP PUSAT
18	PT. SUNMI (INDUSTRI) TB	SUNGAILAT	0	2	-	-	2	SDG	1	PP PUSAT
19	PT. SUNMI (INDUSTRI) TB	SUNGAILAT	11	4	-	-	15	SDG	1	PP PUSAT
20	PT. SUNMI (INDUSTRI) TB	SUNGAILAT	11	2	-	-	13	SDG	1	PP PUSAT
21	PT. SUNMI (INDUSTRI) TB	SUNGAILAT	7	4	-	-	11	SDG	1	PP PUSAT
22	PT. SUNMI (INDUSTRI) TB	SUNGAILAT	0	0	-	-	0	SDG	1	PP PUSAT
23	PT. SUNMI (INDUSTRI) TB	SUNGAILAT	4	1	-	-	5	SDG	1	PP
24	PT. SUNMI (INDUSTRI) TB	SUNGAILAT	7	20	-	-	27	SDAG	-	-
25	PT. SUNMI (INDUSTRI) TB	SUNGAILAT	3	2	7	0	12	SDG	1	PP PUSAT
Jumlah			0	13	0	0	13		13	

NO.	SEKTOR KLASIFIKASI LAPANGAN UMUM INDONESIA (KLU)	ALAMAT Kecamatan	JUMLAH TENAGA KERJA					Kategori Perusahaan	Peraturan perusahaan	PP
			NSP		NSA		MS			
			L	P	L	P				
3. Jasa Keperawatan, Sosial, dan Perawatan										
1	TAYASAN PENDIDIKAN LEMBAGA NASIONAL SETR BUDI	SUNGAILIT	41	51	-	-	138	SEDIANG	-	
2	TARSA TAPTA	PEMANG	27	36	-	-	63	MENENGAH	-	
3	PKL MITRA TENGAH	SUNGAILIT	208	207	-	-	325	BESAR	1	PKB
4	YUNYUNSI GPE CHANGU ORA ET LABORA	SUNGAILIT	35	33	-	-	79	SEDIANG	-	
5	PT. YUBANI MEDIA BANG	SUNGAILIT	9	1	-	-	18	KECIL	1	PP Disakerperindag
6	TAYASAN PENDIDIKAN SUNGAILIT	SUNGAILIT	38	38	-	-	76	SEDIANG	-	
7	LEMBAGA PENDIDIKAN PEMASARAN	SUNGAILIT	7	8	-	-	15	KECIL	1	PKB
8	BKJ. ARJANI (PT. STARANGA SMARTEN / RL. ARJANI)	SUNGAILIT	18	29	-	-	124	BESAR	1	PP Disakerperindag
9	TAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KEMAJA	MENGO BARAT	22	31	-	-	55	KECIL	-	
10	DL. NETA PRATAMA KEMO	PEMANG	17	9	-	-	26	KECIL	-	
11	PT. BANGUNO TRIANA	SUNGAILIT	30	3	-	-	33	MENENGAH	-	
12	TAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL BELANG	SELAYU	28	28	-	-	54	SEDIANG	-	
13	PT. UGHA PETRA LING BUD	MERANGIN	10	-	-	-	21	SEDIANG	-	
14	BANGKA MEDIA CENTER	SUNGAILIT	9	1	-	-	18	KECIL	1	PP Disakerperindag
15	TAYASAN AMIZENI SUNGAILIT	SUNGAILIT	1	21	-	-	18	KECIL	-	
16	SANANG OPERATUM	SUNGAILIT	9	8	-	-	15	KECIL	1	PP PKB
17	Befral Utam Sungailit	SUNGAILIT								
18	PT. Nara Permata Jaya Segel	SUNGAILIT	14	3	-	-	17	SEDIANG	1	PP Disakerperindag
Jumlah									7	

Jumlah Perusahaan Yang Wajib Memiliki PP : 142

Perusahaan yang sudah memiliki PP dan PKB : 76

Perusahaan yang belum memiliki PP : 66

Dengan rincian:

PP yang disahkan dinas 29

PP yang disahkan oleh Provinsi dan Pusat serta Perusahaan yang menggunakan PKB 47

Total PP 76

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

% Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	(Jumlah perusahaan yang menerapkan syarat kerja (memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama) dibagi jumlah perusahaan yang wajib membuat peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama) x 100%	76 / 142 X 100% = 53,50%
---	--	--------------------------



- b. *Analisa perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Tabel 3.7
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya,
Realisasi dan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1.	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja	%	44,29	47,86	47,89	49,30	-	-	
	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	%	-	-	-	-	31,57	30,11	41,38

Capaian indikator sasaran yaitu Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan indikator untuk tahun 2021. Untuk Tahun 2021 capaian kinerja mengalami penurunan dari 31,57 persen menjadi 31,11 persen. Dan untuk tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 11,27 dibandingkan tahun 2022 dikarenakan semua program pada Urusan Ketenagakerjaan dapat di laksanakan.

- c. *Analisa realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)*

Untuk indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah tidak ada standar nasional yang dapat dijadikan pembanding. Dikarenakan Indikator yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan tidak sama sehingga tidak bisa membandingkan dengan realisasi Kinerja dengan standar Nasional.

- d. *Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Komitmen perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan.
 - b. Adanya Komitmen perusahaan untuk patuh terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja.
 - c. Adanya Perusahaan yang melaporkan TKA yang bekerja di Kabupaten Bangka.
- e. *Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya*

Tabel 3.8
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran

Tahun	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2023	388.475.350,00,00	354.688.404,00,00	91,30	8,70

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 388.475.350,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp. 354.688.404,00 atau sebesar 91,30 persen. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 8,70 persen.

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator sasaran ini adalah :

1. Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja.
 - Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.
 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.
 - Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Hubungan Industrial

- Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Bangka.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
- Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian dari segi anggaran sangat efisien.

f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang secara langsung mendukung terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator sasaran "**Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah**" di dukung oleh :

1. Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja.
 - Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.
 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.

- Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Hubungan Industrial
- Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Bangka.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
 - Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

Ikhtisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Ikhtisar kinerja program dan kegiatan

NO	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	% Realisasi
1.	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja			
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi			
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	Alokasi:	Fisik :
			117.746.800,00	100,00
			Realisasi :	Keuangan :
			112.232.996,00	95,32

2.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Alokasi : 101.076.960,00 Realisasi : 90.183.515,00	100 Keuangan : 89,22
	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota			
	Sub Kegiatan Koordinasidan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Jumlah TKA yang terdata	Alokasi : 24.820.000,00 Realisasi : 15.850.000,00	Fisik : 100 Keuangan : 63,86
3.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Bangka			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Soisal Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Alokasi : 20.550.000,00 Realisasi : 20.500.000,00	Fisik : 100 Keuangan : 99,76
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Perkara yang Terselesaikan	Alokasi : 45.507.590,00 Realisasi : 44.535.787,00	Fisik : 100 Keuangan : 97,86
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Alokasi : 20.000.000,00 Realisasi : 19.319.657,00	Fisik : 100 Keuangan : 96,60
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Alokasi : 58.774.000,00 Realisasi : 52.066.49,00	Fisik : 100 Keuangan : 88,59
Rata-rata			Fisik : 100% Keuangan : 90,17%	

Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

a. *Analisa perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Keberhasilan Sasaran strategis diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

Tabel 3.10
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	22,64	25,26	111,57	Sangat Baik/Berhasil

Berdasarkan tabel diatas Indikator Sasaran dapat dirumuskan dengan cara membandingkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dengan PDRB berdasarkan harga berlaku yaitu Kontribusi Industri Pengolahan sebesar Rp. 4.875.610.000.000,00 dan Total PDRB sebesar Rp. 19.298.850.000.000,00 dengan realisasi indikator sebesar 25,26 persen dengan capaian 111,57 persen. Dengan PDRB sebagai berikut :

Tabel 3.11
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023

KABUPATEN BANGKA DALAM ANGKA 2024

Tabel 12.1. **Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bangka (miliar rupiah), 2019–2023**
Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry in Bangka Regency (billion rupiahs), 2019–2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.690,08	2.996,71	3.306,36	3.575,03	3.933,55
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1.347,49	1.315,81	1.712,66	1.695,97	1.617,38
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	2.955,32	3.016,70	3.908,20	4.671,88	4.875,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	34,15	36,56	41,85	40,85	41,38
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	3,17	3,40	3,76	3,95	4,36
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.470,46	1.417,09	1.548,53	1.633,46	1.830,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.935,24	1.815,63	1.989,71	2.362,41	2.533,80
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	350,57	320,10	358,62	412,53	483,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	399,72	402,90	461,49	531,93	601,38
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	303,32	339,57	370,68	410,95	472,73

Lanjutan Tabel/Continued Table 12.1

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	398,50	358,46	398,58	466,62	554,77
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	498,79	514,33	557,56	601,25	647,42
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	38,14	34,12	38,05	44,43	52,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	747,04	760,66	813,86	805,42	857,03
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	327,04	336,73	358,86	382,50	433,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	146,61	150,49	176,63	184,43	204,65
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	119,79	113,68	120,61	135,22	154,82
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		13.765,43	13.932,94	16.166,01	17.958,83	19.298,85

Catatan/Note: *Angka Sementara/*Preliminary Figures*

**Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/*BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources*

- b. *Analisa perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Tabel 3.12
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya,
Realisasi dan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	21,23	21,57	24,22	26,01	25,26

Capaian indikator lima tahun yaitu Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Sedangkan tahun 2019 realisasi capaiannya sebesar 21,23 persen. Dan untuk tahun 2020 realisasi capaiannya terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 0,34 persen atau meningkat dari 21,23 persen menjadi 21,57 persen. Untuk Tahun 2021 realisasi capaiannya terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,65 persen atau meningkat dari 21,57 persen menjadi 24,22 persen. Sedangkan untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,07 persen dari tahun 2021 atau meningkat dari 24,22 persen menjadi 26,01. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,75 persen dari tahun 2022 atau mengalami penurunan dari 26,01 persen menjadi 25,26 persen.

- c. *Analisa realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)*

Untuk indikator persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tidak ada standar nasional yang dapat dijadikan pembandingan. Dikarenakan Indikator yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan tidak sama sehingga tidak bisa membandingkan dengan realisasi Kinerja dengan standar Nasional.

d. *Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Berdasarkan tabel diatas Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2023 capaian kinerjanya melebihi target dengan kategori sangat baik/berhasil karena diatas dari 100,00 persen, dengan target sebesar 22,64 persen dan dapat direalisasikan sebesar 25,26 persen, dengan capaian kinerja 111,57 persen.

Adapun pencapaian sasaran Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB melalui 2 program, 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, yaitu

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Kooridinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengsn Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

3. Program Pengelolaan Sistem Infromasi Industri Nasional

- Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Desiminasi Publikasi Data Infromasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas.

e. *Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya*

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran

Tahun	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Tidak Efisiensi (%)
2023	1.489.790.221,00	1.124.432.051,00	75,48	24,52

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.489.790.221,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp. 1.124.432.051,00 atau sebesar 75,48 persen. Dengan demikian belanja pada program ini tidak efisiensi sebesar 24,52 persen.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator sasaran ini adalah :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
 - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Desiminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas.

Dengan demikian dari segi anggaran tidak efisien.

f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang secara langsung mendukung terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator sasaran “ Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB” adalah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kegiatan Penerbitan Izin Usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Desiminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas.

Ikhtisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut : Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Tabel 3.14
Ikhtisar kinerja program dan kegiatan

NO	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	% Realisasi
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Alokasi : 1.463.317.721,00 Realisasi : 1.114.914.051,00	Fisik : 100 Keuangan : 76,19
2.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Alokasi : 10.472.500,00 Realisasi : 300.000,00	Fisik : 0 Keuangan : 2,86
3.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industry untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Alokasi : 16.000.000,00 Realisasi : 9.218.000,00	Fisik : 100 Keuangan : 57,61
Rata-rata			Fisik : 66,67 Keuangan : 45,55	

Sasaran 3 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

a. *Analisa perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Keberhasilan sasaran strategis diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB.

Tabel 3.15

Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Persentase kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,68	13,13	89,44	Sangat Baik/Berhasil

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023 Indikator Sasaran dapat dirumuskan dengan cara membandingkan Kontribusi Sektor Perdagangan dengan PDRB berdasarkan harga berlaku yaitu Kontribusi sektor Perdagangan sebesar Rp. 2.533.880.000.000,00 dan Total PDRB sebesar Rp. 19.298.850.000.000,00 dengan realisasi indikator sebesar 13,13 persen dan capaian 89,44 persen dan hasil yang diperoleh termasuk kategori Sangat Baik/berhasil.

Tabel 3.16

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023

KABUPATEN BANGKA DALAM ANGKA 2024

Tabel 12.1. **Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bangka (miliar rupiah), 2019–2023**
Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry in Bangka Regency (billion rupiahs), 2019–2023

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.690,08	2.996,71	3.306,36	3.575,03	3.933,55
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1.347,49	1.315,81	1.712,66	1.695,97	1.617,38
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	2.955,32	3.016,70	3.908,20	4.671,88	4.875,61
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	34,15	36,56	41,85	40,85	41,38
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	3,17	3,40	3,76	3,95	4,36
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.470,46	1.417,09	1.548,53	1.633,46	1.830,95
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.935,24	1.815,63	1.989,71	2.362,41	2.533,80
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	350,57	320,10	358,62	412,53	483,44
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	399,72	402,90	461,49	531,93	601,38
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	303,32	339,57	370,68	410,95	472,73

Lanjutan Tabel/Continued Table 12.1

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	398,50	358,46	398,58	466,62	554,77
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	498,79	514,33	557,56	601,25	647,42
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	38,14	34,12	38,05	44,43	52,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	747,04	760,66	813,86	805,42	857,03
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	327,04	336,73	358,86	382,50	433,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	146,61	150,49	176,63	184,43	204,65
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	119,79	113,68	120,61	135,22	154,82
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		13.765,43	13.932,94	16.166,01	17.958,83	19.298,85

Catatan/Note: *Angka Sementara/*Preliminary Figures*

**Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/*BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources*

- b. *Analisa perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Tabel 3.17
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya,
Realisasi dan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1.	Persentase kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,17	13,08	12,29	13,13	13,13

Capaian indikator ini selama lima tahun dengan indikator sasaran yaitu Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Dan pada tahun 2019 capaian sebesar 14,17 persen, sedangkan untuk tahun 2020 capaian menurun menjadi 13,08 persen atau menurun dari 14,17 persen pada tahun 2019 menjadi 13,08 persen pada tahun 2020. Sedangkan untuk Tahun 2021 capaian kinerja juga menurun dari 13,08 persen atau menurun dari 13,08 persen pada tahun 2020 menurun menjadi 12,29 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022 realisasi capaian mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dari 12,29 persen menjadi 13,13 persen. Dan pada tahun 2023 realisasi capaian sama dengan tahun 2022 sebesar 13,13 persen.

- c. *Analisa realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)*

Untuk indikator persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tidak ada standar nasional yang dapat dijadikan pembandingan. Dikarenakan Indikator yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan tidak sama sehingga tidak bisa membandingkan dengan realisasi Kinerja dengan standar Nasional.

d. *Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Pencapaian sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB melalui 3 program, 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yaitu

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Program Stabilisasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
3. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan
Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal, berupa Tera , Tera Ulang
Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi legal

e. *Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya*

Tabel 3.18
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran

Tahun	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Tidak Efisiensi (%)
2023	3.052.719.430,00	2.568.469.324,00	84,14	15,86

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.052.719.430,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp. 2.568.469.324,00 atau sebesar 84,14

persen. Dengan demikian realisasi belanja program ini termasuk tidak efisien sebesar 15,86 persen.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator sasaran ini adalah :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

2. Program Stabilisasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

- Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

3. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

- Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal, berupa Tera, Tera Ulang.
 - Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi legal.

Dengan demikian dari segi anggaran Tidak efisien.

f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang secara langsung mendukung terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator sasaran “ Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB” adalah Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan

Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan dan Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi legal.

Ikhtisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut : Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dan Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Tabel 3.19
Ikhtisar kinerja program dan kegiatan

NO	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	% Realisasi
1.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pelayanan UPT Pasar	Alokasi : 2.504.719.430,00 Realisasi : 2.062.091.796,00	Fisik : 100 Keuangan : 82,33

2.	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
	Kegiatan Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota			
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Data dan stok Harga Bapokting	Alokasi : 84.000.000,00 Realisasi : 81.577.360,00	Fisik : 100 Keuangan : 97,12
	Sub Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pasar yang Dilakukan	Alokasi : 323.000.000,00 Realisasi :	Fisik : 100 Keuangan :
3.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		292.869.132,00	90,67
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	Alokasi : 119.000.000,00 Realisasi : 110.462.917,00	Fisik : Keuangan : 92,83
	Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pemilik UTTP yang mendapatkan pengawasan dan Penyuluhan Metrologi Legal	Alokasi : 22.000.000,00 Realisasi : 21.468.119,00	Fisik : 100 Keuangan : 97,58
Rata-rata			Fisik : 100%	
			Keuangan : 92,11%	

Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah

Keberhasilan sasaran strategis diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Untuk Penilaian Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 Penilaian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka mengalami peningkatan memperoleh Kategori BB dan nilai (74,02). Tahun 2021 dengan target Kategori BB nilai (74,25) dan memperoleh penilaian dengan Kategori BB nilai (74,64), mengalami kenaikan sebesar (0,39) dibandingkan dengan target yang ditetapkan di Tahun 2021. Tahun 2022 dengan target Kategori BB nilai (74,25) dan memperoleh penilaian dari Inspektorat dengan Kategori BB nilai (73,86) mengalami penurunan sebesar (0,39) dari tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2023 dengan target Kategori BB (74,50) dan memperoleh penilaian dari Inspektorat dengan Kategori BB nilai (76,23), mengalami kenaikan sebesar (2,37) dibandingkan dengan target yang ditetapkan di Tahun 2023.

Tabel 3.20
DATA REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Persentase Capaian
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	28,50	25,35	88,95
			Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	11,45	11,50	100,44
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	100%	
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	100%	100,00
		<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>6 Dokumen</i>	100,00
		<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>5 Dokumen</i>	100,00
		<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	100,00

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00
			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	0,00%	0,00
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	100,00%	100,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang (25 Laki-laki dan 23 Perempuan)	48 Orang (25 Laki-laki dan 23 Perempuan)	100,00
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100,00
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	40 Laporan	40 Laporan	100,00
			Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah	64,05	64,16%	100,17
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	18,87%	18,87%	100,00
			Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%	100%	100,00
			Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100%	100%	100,00

		<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	100,00
		<i>Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>11 Dokumen</i>	<i>11 Dokumen</i>	100,00
		<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>10 Orang</i>	<i>10 Orang</i>	100,00
			Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	2	2	100,00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	100%	100,00
			Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan	3 Layanan	100,00
		<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>	100,00
		<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>	100,00
		<i>Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>	100,00
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100,00
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100,00
		<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	100,00
		<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	100,00
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100,00
		<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	100,00
		<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	100,00
		<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	100,00

		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	100%	100,00
		<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>4 unit Kendaraan Roda Dua, 14 Unit Kendaraan Roda Dua</i>	<i>4 unit Kendaraan Roda Dua, 1 Unit Kendaraan Roda Dua</i>	27,78
		<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>30 Unit</i>	<i>30 Unit</i>	100,00
		<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	100,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
			Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	8,80%	6,79%	77,16
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang kompeten	5,30%	5,30%	100,00
		<i>Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023</i>	<i>30 Orang</i>	<i>30 Orang</i>	100,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	32,95%	5,20%	15,78
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencaker	52,00%	74,46%	143,19
		<i>Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</i>	<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>	<i>10 Lowongan</i>	<i>6 Lowongan</i>	60,00
				<i>265 Pencaker</i>	<i>404 Pencaker</i>	152,45
			<i>Jumlah Pencari Disabilitas yang mengikuti simposium</i>	<i>100 orang</i>	35 Orang	35,00
		Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Bangka	13 TKA	11 TKA	84,62

		<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah TKA yang terdata</i>	35 TKA	44 TKA	125,71
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	53,52%	53,52%	100,00
		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	43,94%	43,94%	100,00
		<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>	40 Laporan	40 Laporan	100,00
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	62,50%	62,50%	100,00
		<i>Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>	16 Perkara	16 Perkara	100,00
		<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi</i>	<i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>	2 Asosiasi dan 10 Serikat Pekerja	2 Asosiasi dan 10 Serikat Pekerja	100,00
		<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00

	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Representatif	100,00%	100,00%	100,00
		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Aman sehat dan Ber SNI	100,00%	100,00%	100,00
			Persentase pencapaian Target penerimaan retribusi sarana distribusi Perdagangan	100,00%	100,00%	109,46
		<i>Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>	-	-	
		<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	1 Unit UPT Pasar	1 Unit UPT Pasar	100,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
			Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting	100,00%	100,00%	100,00
		Kegiatan Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Persentase Kecukupan Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting	100,00%	100,00%	100,00
			Rasio terlaksananya monitoring/pemantauan harga dan stok Bapokting pada Pelaku Usaha perdagangan	100	100	100,00
		<i>Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	28 Laporan	28 Laporan	100,00
		<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	8 Laporan	7 Laporan	87,50

		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
			Persentase Alat standar tera/tera ulang	100,00%	30,77%	30,77
		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Penurunan Pelanggaran UTTP	100,00%	64,30%	64,30
		<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang</i>	<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>	1800 Unit	1084 Unit	60,22
		<i>Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>	100 Orang	380 Orang	380,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
			Persentase Penjaminan Mutu dan Perlindungan Produk IKM	16,00%	16,81%	105,06
			Persentase Peningkatan Penjaminan Mutu Produk IKM	28,99%	29,03%	100,14
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Industri yang mendapatkan Standarisasi manajemen Mutu Produk IKM	3,65%	1,84%	50,41
		<i>Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	8 Dokumen	10 Dokumen	125,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
			Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan IKM	16,00%	16,14%	100,88
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menyampaikan Laporan melalui SIINAS	15,60%	39,47%	253,01

		<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS</i>	<i>30 Dokumen</i>	<i>26 Dokumen</i>	86,67
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
			Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan IKM	16,00%	16,14%	100,88
		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menyampaikan Laporan melalui SIINAS	15,60%	39,47%	253,01
		<i>Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>3 Dokumen</i>	100

B. Realisasi Anggaran

Belanja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 pagu anggaran sebesar Rp. 13.352.412.659 ,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.893.706.943,00 atau 81,59% sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah pagu anggaran Rp. 4.391.616.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.806.937.300,00 atau 109,46% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.21
Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi		
				Anggaran	%	Fisik (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.355.000,00	36.660.800,00	98,14	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.160.000,00	3.160.000,00	100,00	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.160.000,00	3.160.000,00	100,00	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.160.000,00	3.160.000,00	100,00	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.160.000,00	3.160.000,00	100,00	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.545.000,00	8.545.000,00	100,00	100
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.120.000,00	5.120.000,00	100,00	100
	Kegiatan Admisntrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.213.622.063,00	4.673.782.891,00	75,22	100
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	24.840.000,00	24.237.760,00	97,58	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.880.000,00	5.720.000,00	97,28	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.880.000,00	3.800.450,00	64,63	100

	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.750.000,00	9.670.000,00	99,18	100
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.000.000,00	2.906.520,00	96,88	100
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	95.000.000,00	94.059.358,00	99,01	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387.988.197,00	386.198.782,00	99,54	100
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000,00	2.909.160,00	96,97	100
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.000.000,00	2.027.500,00	67,58	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	31.109.750,00	27.950.000,00	89,84	100
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.780.660,00	24.750.000,00	99,88	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.670.000,00	143.238.386,00	99,70	100
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.630.000,00	22.589.000,00	99,82	100
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	24.608.200,00	98,43	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.044.226.900,00	1.038.336.903,00	99,44	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.565.088,00	106.962.522,00	86,56	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.825.000,00	189.403.932,00	99,26	100

2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Sub Kegiatan Proses Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Keompetensi	117.746.800,00	112.232.996,00	95,32	100
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Online	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar kerja Online	101.076.960,00	90.183.515,00	89,22	100
	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	24.820.000,00	15.850.000,00	63,86	100
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berdampak pada kepentingan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.550.000,00	20.500.000,00	99,76	100
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	45.507.590,00	44.535.787,00	97,86	100
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	20.000.000,00	19.319.657,00	96,60	100
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	58.774.000,00	52.066.449,00	88,59	100
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.504.719.430,00	2.062.091.796,00	82,33	100

6	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKO DAN BARANG PENTING					
	Kegiatan Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	84.000.000,00	81.577.360,00	97,12	100
		Sub Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	323.000.000,00	292.869.132,00	90,67	100
7	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	119.000.000,00	110.462.917,00	92,83	100
		Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	22.000.000,00	21.468.119,00	97,58	100
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1.463.317.721,00	1.114.914.051,00	76,19	100
9	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), izin Perluasan Usaha industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKi) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	10.472.500,00	300.000,00	2,86	0
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industry untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Infomasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	16.000.000,00	9.218.000,00	57,61	100
		JUMLAH	13.352.412.659,00	10.893.706.943,00	81,59	

Tabel 3.22
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	4.391.616.500,00	4.806.937.300,00	109,46
Hasil Retribusi Daerah	4.391.616.500,00	4.806.937.300,00	109,46
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	120.000.000,00	129.850.000,00	108,21
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.383.766.000,00	1.643.947.500,00	118,80
Retribusi Penyediaan fasilitas Pasar / Pertokoan yang dikontrakkan	1.150.000.000,00	1.071.902.000,00	93,21
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.607.350.500,00	1.792.555.000,00	111,52
Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	130.500.000,00	168.682.800,00	129,26

LAMPIRAN



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. ASEP SETIAWAN
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MULKAN, SH., MH
Jabatan : BUPATI BANGKA

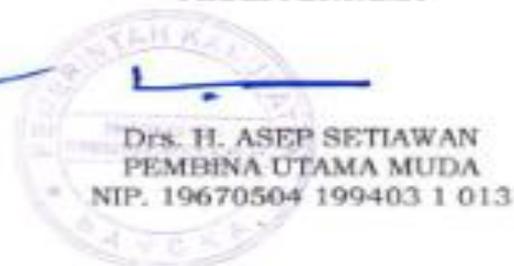
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Sungailiat, 30 Januari 2023
PIHAK PERTAMA



PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks	32,15
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	22,64
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,68
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori /Nilai	BB (74,50)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.099.486.620,00	APBD
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	117.746.800,00	APBD
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	157.265.000,00	APBD
4	Program Hubungan Industrial	177.356.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.614.519.880,00	APBD
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	157.000.000,00	APBD
7	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	146.000.000,00	APBD
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.029.861.365,00	APBD
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	10.472.500,00	APBD
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	16.000.000,00	APBD
	TOTAL	13.525.708.165,00	



Sungailiat, 30 Januari 2023
PIHAK PERTAMA





**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. ASEP SETIAWAN
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HARIS AR, AP., MH
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
M. HARIS AR, AP., MH

Sungailiat, 01 November 2023
PIHAK PERTAMA

Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670504 199403 1 013

SKPD : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN : 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks	32,15
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	22,64
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	14,68
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori Nilai	(BB) 74,50

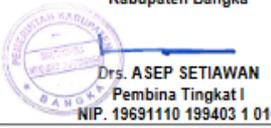
No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.421.427.658,00	APBD
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	117.746.800,00	APBD
3.	Penempatan Tenaga Kerja	125.896.960,00	APBD
4.	Hubungan Industrial	144.831.590,00	APBD
5.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.504.719.430,00	APBD
6.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	157.000.000,00	APBD
7.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	141.000.000,00	APBD
8.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.463.317.721,00	APBD
9.	Pengendalian Izin Usaha Industri	10.472.500,00	APBD
10.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	16.000.000,00	APBD
	TOTAL	13.102.412.659,00	

PIHAK KEDUA

M. HARISAR, AP., MH

Sungailiat, 01 November 2023
PIHAK PERTAMA

Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670504 199403 1 013

 PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	NOMOR SOP	: 188.4/14.a/DINAKERPERINDAG/2021
	TGL. PEMBUATAN	: 04 Februari 2021
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 04 Februari 2021
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka  Drs. ASEP SETIAWAN Pembina Tingkat I NIP. 19691110 199403 1 010
NAMA SOP	: Penyusunan Data Kinerja	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA:
1 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lambaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) 2 Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka		1 Memiliki kemampuan pengidentifikasi perencanaan dan penganggaran 2 Memahami tugas dan fungsi OPD terkait 3 Memahami Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinakerperindag 4 Memahami RPJM Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan penjabarannya melalui Renstra OPD dan RKPD Kab. Bangka
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
Seluruh OPD di Kabupaten Bangka dan SOP Penyusunan Buku Laporan Kinerja		1 Komputer/Printer/Scan 2 Tupoksi 3 RKA OPD TA 2020, RPJMD, RENSTRA OPD dan RKPD
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika Pengumpulan Data Kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja akan terlambat		1. Disimpan sebagai data perencanaan elektronik

IDENTIFIKASI JUDUL SOP BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Instandi : Pemerintah Kabupaten Bangka
Unit Kerja Eselon II : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Unit Kerja Eselon III : Sekretariat
Unit Kerja Eselon IV : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi (Kegiatan)	Output	Aspek	Judul SOP
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan	Mengkoordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas	Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan	Data LAKIN	Pengumpulan	Pengumpulan Data LAKIN

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	:	Pengumpulan Data LAKIN
2. Jenis Kegiatan	:	Rutin
3. Penanggung Jawab	:	
a. Produk	:	Kadin
b. Kegiatan	:	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
4. Scope (Ruang Lingkup)	:	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

B. Identifikasi Kegiatan

Nama Kegiatan	:	Pelaksanaan Pengumpulan Data Kinerja
Langkah Awal	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan menugaskan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan untuk menyusun LAKIN lingkup Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Langkah Utama	:	Seluruh Bidang menghimpun data LAKIN di masing-masing bidang, menyerahkan format isian LAKIN beserta data pendukung penyusunan LAKIN dan menyerahkan kepada pengelola bahan perencanaan
Langkah Akhir	:	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal :	1	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan menugaskan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan untuk menyusun LAKIN lingkup Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
	2	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan menindaklanjuti dan menugaskan Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan untuk mengumpulkan data awal Laporan Kinerja
	3	Kasubbag perencanaan dan pelaporan menyusun personil tim penyusunan LAKIN, membuat jadwal kerja, membuat surat permintaan data LAKIN beserta format pengumpulan data dan mendistribusikan ke masing-masing bidang
Langkah Utama :	4	Seluruh Bidang menghimpun data LAKIN di masing-masing bidang, menyerahkan format isian LAKIN beserta data pendukung penyusunan LAKIN dan menyerahkan kepada pengelola bahan perencanaan
	5	Pengelola bahan perencanaan merekapitulasi seluruh data LAKIN dari masing-masing bagian dan menyerahkan kepada kasubbag perencanaan dan pelaporan
Langkah Akhir :	6	Kasubbag perencanaan dan pelaporan menerima rekapitulasi data LAKIN

FLOWCHART Pengumpulan Data LAKIN

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		KEPALA DINAKERPERINDAG	SEKRETARI	KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN	BIDANG	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Menugaskan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan untuk menyusun LAKIN lingkup Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	3	4	6	8	7	8	8	10	11
1		3	4	6	8	7	8	8	10	11
2	Menindaklanjuti dan menugaskan Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan untuk mengumpulkan data awal Laporan Kinerja		4	6	8	7	8	8	10	11
3	Menyusun personil tim penyusunan LAKIN, membuat jadwal kerja, membuat surat permintaan data LAKIN beserta format pengumpulan data dan mendistribusikan ke masing-masing bidang		4	6	8	7	8	8	10	11
4	Menghimpun data LAKIN di masing-masing bidang, menyerahkan format isian LAKIN beserta data pendukung penyusunan LAKIN dan menyerahkan kepada pengelola bahan perencanaan		4	6	8	7	8	8	10	11
5	Merekapitulasi seluruh data LAKIN dari masing-masing bagian dan menyerahkan kepada kasubbag perencanaan dan pelaporan		4	6	8	7	8	8	10	11
6	Menerima rekapitulasi data LAKIN		4	6	8	7	8	8	10	11